

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan cara meningkatkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pemerintah daerah dapat mengatur dan memberikan wewenang sendiri atas aspek kehidupan di daerahnya baik aspek pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. pada hal ekonomi pemerintah daerah membentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Pada hakikatnya BUMD mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung peran pemerintah dalam aspek pembangunan ekonomi daerah (Muryanto, 2017).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki fungsi dan peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi berupa lapangan pekerjaan dan dalam bentuk pajak serta deviden bagi pemerintah daerah. BUMD diharapkan menjadi wujud nyata investasi pemerintah daerah dalam membantu membangun perkembangan pembangunan dan ekonomi bagi daerah, maka dari itu BUMD harus dapat bersaing dengan masuknya pasar global dan terus melakukan inovasi yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah (Muryanto, 2017).

Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Rizki, pada tahun 2023 menyebutkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki lima Badan Usaha yang bergerak di berbagai bidang, BPRS BTB yang bergerak dalam bidang perbankan, PT Sayaga Wisata yang bergerak dalam sektor pariwisata, PD Pasar Tohaga yang bergerak di bidang pengelolaan fasilitas pasar, PDAM Tirta Kahuripan yang bergerak di bidang penyediaan air bersih, dan PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya tambang di Kabupaten Bogor (BogorKita.com, 2023).

Dari lima badan usaha yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor, BPRS BTB merupakan salah dua dari lima badan usaha yang mempunyai akuntabel yang sehat. PDAM Tirta Kahuripan merupakan badan usaha milik pemerintah Kabupaten Bogor yang tertua dan secara akuntabel merupakan badan usaha yang paling stabil. PDAM Tirta Kahuripan berdiri sejak tahun 1977 dan terus berkembang hingga sekarang.

Walaupun PDAM Tirta Kahuripan merupakan badan usaha yang stabil, BPRS BTB juga tidak mau kalah dengan kakaknya yaitu PDAM Tirta Kahuripan. Walaupun BPRS BTB merupakan BUMD termuda saat ini di Kabupaten Bogor tetapi, kinerja dari BPRS BTB tidak dapat diremehkan. BPRS BTB sudah mencatatkan berbagai prestasi di ajang nasional dan kinerja keuangan yang memiliki peningkatan pesat saat pandemi covid 19 melalui programnya.

PT BPRS Bogor Tegar Beriman merupakan salah satu BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bogor yang bergerak dibidang perbankan syariah. Didirikan dalam upaya membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bogor.

PT BPRS BTB dibentuk berdasarkan pada PERDA Kabupaten Bogor No. 20 Tahun 2011 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Setelah penerbitan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman pada tanggal 12 November 2015 Nomor 8 dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-2466044.AH.01.01 tahun 2015 tanggal 12 November 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Bogor Tegar Beriman (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011).

PT BPRS Bogor Tegar Beriman menjadi BUMD paling muda di antara BUMD lain di Kabupaten Bogor, banyak prestasi yang sudah diraih oleh PT BPRS BTB salah satunya adalah Pemenang *The Best Excellent Category 50*, pemenang Category 100 M, BPRS Terbaik Pembina UMKM yang dimana penghargaan ini sangat bergengsi di bidang perbankan yang diberikan oleh Info Bank dan Republika. dan menjadi salah dua BUMD tersehat di Kabupaten Bogor.



Gambar 1.1

Dilansir dari BogorKita.com, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT BPRS Bogor Tegar Beriman berhasil meraih penghargaan sebagai BPRS BUMD terbaik

tahun 2021 dengan predikat “The Best” kategori aset 50-100 Miliar. Republik Indonesia dalam hal penilaian. BPRS Bogor Tegar Beriman bersaing dengan 158 BPRS yang beroperasi di Indonesia. Penghargaan yang bergengsi dari Info bank dan adanya keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia ini memiliki indikator utama dalam penilaiannya. Indikator tersebut antara lain rasio permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, efisiensi, serta pertumbuhan dana, pembiayaan, modal, dan laba. Penghargaan tersebut membuktikan bahwa BPRS Bogor Tegar Beriman telah menerapkan tata kelola perusahaan yang sangat baik (BogorKita.com, 2021).

Selama mulai beroperasi Bank BPRS BTB sudah mencatatkan sejumlah prestasi dari segi kinerja perusahaan yang baik. Dapat dilihat dari laporan keuangan tahunan yang selalu mengalami peningkatan yang luar biasa, tentu tidak mungkin jika penerapan GCG dari Bank BPRS BTB ini tidak baik (BogorKita.com, 2021).

Hadirnya Bank BPRS BTB di Kabupaten Bogor sendiri menjadi kabar gembira bagi para pelaku usaha UMKM dan pelaku usaha mikro, karena pada dasarnya Bank BPRS BTB dibentuk untuk membantu para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bogor. Mudahnya cara peminjaman membuat Bank BPRS BTB menjadi andalan bagi para pelaku usaha skala UMKM hingga Makro. Produk - produk yang ditawarkan juga sangat menarik ditambah Bank BPRS BTB sendiri adalah bank syariah menambah minat masyarakat serta bunga yang kompetitif dari bank - bank lain.

Bank BPRS BTB sendiri mendapatkan predikat sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersehat di Kabupaten Bogor. Sebagai BUMD termuda di Kabupaten Bogor, Bank BPRS BTB hanya membutuhkan waktu 7 tahun untuk mendapatkan peningkatan yang signifikan dari modal yang ditanamkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Tentu saja itu hal yang baik bagi pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendapatkan tambahan anggaran yang tertuang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini menandakan bahwa kinerja Bank BPRS BTB sudah sangat baik. Hal ini juga saling berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik oleh Bank BPRS BTB.

Pada tahun 1999 setelah Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat buruk pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* berdasarkan keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 dengan

tujuan guna menyiapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang baik untuk sektor industri agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan di dunia. *Good Corporate Governance* dapat dikatakan dengan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah - kaidah yang mendorong kinerja perusahaan agar berfungsi secara efisien dan menghasilkan nilai ekonomi berjangka panjang (*World Bank*). Sehingga *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai pedoman untuk perusahaan yang wajib diikuti dalam pengelolaan aset- aset perusahaan agar mendapatkan hasil yang efisien dan optimal hingga memberikan keuntungan jangka panjang bagi Perusahaan (Daniri, 2014).

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam dunia industri merupakan kewajiban bagi sebuah korporasi untuk dapat bersaing dalam industri global ini. Tidak dapat dipungkiri tata kelola perusahaan yang baik akan sangat baik bagi perusahaan karena dapat mengatur secara efisien aset-aset perusahaan serta hubungan yang baik antara perusahaan dengan *stakeholder* atau para pemangku kepentingan lainnya (Daniri, 2014).

Dengan adanya sistem yang terencana dapat tercapai sistem tata kelola perusahaan yang baik dan dapat dijadikan pedoman dasar perusahaan dalam proses manajerial perusahaan. Adapun prinsip-prinsip menurut Sidharta Utama (2019) prinsip *Good Corporate Governance* adalah Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, *Fairness*. Dengan menerapkan prinsip tersebut dengan tujuan sebuah perusahaan dapat mengelola perusahaan dengan baik (KNKG, 2019). *Good Corporate Governance* memiliki output yang berbentuk bermacam-macam produk kebijakan antara lain : SOP, *Code of Conduct*, CSR, budaya perusahaan,

Berdasarkan pemaparan mengenai pentingnya penerapan *good corporate governance* yang dilakukan oleh BPRS BTB, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana BPRS BTB menerapkan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang akan menggunakan teori keagenan. Dikarenakan BPRS BTB mempunyai julukan sebagai BUMD tersehat di Kabupaten Bogor serta mendapatkan feedback yang luar biasa baik dikalangan masyarakat Kabupaten Bogor, ditambah dengan inovasi yang dilakukan Bank BPRS BTB yang akan membuat kinerja perusahaan akan menjadi makin baik untuk kedepannya.

Peneliti berharap, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana penerapan prinsip *good corporate governance* BPRS BTB berdasarkan teori keagenan sehingga

mampu mengungkapkan bagaimana analisis penerapan *good corporate governance*. sehingga kedepannya penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap BPRS BTB yang berlandaskan teori

Dari kelima badan usaha yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti BPRS BTB dikarenakan BPRS BTB merupakan BUMD termuda saat ini yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, walaupun BPRS BTB menjadi BUMD termuda tetapi BPRS BTB juga telah memberikan kinerja dan prestasi yang luar biasa dengan waktu yang terhitung singkat serta BPRS BTB juga mendapatkan julukan sebagai BUMD tersehat di Kabupaten Bogor. Walau dari segi akuntabilitas BPRS BTB masih kalah dengan kakaknya yaitu PDAM Tirta Kahuripan yang sudah berdiri dari tahun 1977 dan menjadi BUMD tertua di Kabupaten Bogor, tetapi peneliti tertarik untuk meneliti BPRS BTB dikarenakan perkembangan yang sangat luar biasa.

Atas pemekaran diatas peneliti menetapkan judul penelitian ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BOGOR TEGAR BERIMAN.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang diatas, peneliti akan memfokuskan penelitian pada analisis implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* PT BPRS Bogor Tegar Beriman menggunakan teori keagenan. dengan fokus analisis adalah implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* PT BPRS Bogor Tegar Beriman.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang didapat dalam penelitian adalah “Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* PT BPRS Bogor Tegar Beriman?”

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana BPRS BTB selaku BUMD Pemerintah Kabupaten Bogor telah menerapkan prinsip-prinsip *Good*

*Corporate Governance* dengan baik, hingga adanya julukan sebagai BUMD tersehat di Kabupaten Bogor

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini hal yang ingin dicapai adalah manfaat langsung dan tidak langsung bagi perusahaan dan bagi praktisi diharapkan dari penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

#### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hubungan Masyarakat terutama mengenai analisis penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan, serta dapat dijadikan referensi untuk pembahasan analisis penerapan *Good Corporate Governance*.

#### 2) Manfaat praktis

Penelitian dibuat salah satunya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu komunikasi, pada Program Studi S1 Hubungan Masyarakat. Serta diharapkan mampu memberikan masukan yang memiliki dasar keilmuan kepada dalam hal, mengelola *Good Corporate Governance* di masa mendatang.